

BEDAH KISI-KISI DI PALIYAN
Hadapi ASPD, Tingkatkan Prestasi Siswa

WONOSARI (KR) - Tim Ultra *Kedaulatan Rakyat* bekerjasama dengan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilbiddik) Paliyan dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) menyelenggarakan bedah kisi-kisi Asesment Pendidikan Standarisasi Daerah (ASPD) di Kantor Korwilbiddik Paliyan, Selasa (4/2). Kegiatan dibuka Ketua Korwilbiddik Paliyan Hanafiah SPd MM serta diikuti guru-guru dari 23 sekolah di Paliyan. ” Bedah kisi kisi memberikan manfaat cukup besar. Bisa meningkatkan pengetahuan guru dalam nantinya memberikan pembelajaran di sekolah,” kata Hanafiah MM.

Kegiatan juga dihadiri Ketua K3S Paliyan Hanitata MPd.

Diungkapkan, bedah kisi-



KR-Dedy EW

Ketua Korwilbiddik Paliyan membuka bedah kisi-kisi

kisi juga meningkatkan pengetahuan guru, baik itu dalam bentuk literasi, numerasi dan banyak hal baru yang bisa diketahui, terutama guru kelas enam. Harapannya nantinya siswa mampu untuk menghadapi ASPD dengan baik dan mampu untuk meningkatkan prestasi. ” Juga berharap nantinya dengan jalur prestasi ini anak yang lulus bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Termasuk bisa masuk ke se-

kolah favorit di Gunungkidul,” ucapnya.

Ketua K3S Paliyan Hanitata MM menambahkan, harapannya program ini dapat membantu meningkatkan prestasi siswa dan siswi di wilayah Paliyan. Selain itu, guru yang ikut bedah kisi kisi bisa menyampaikan ke siswa sesuai bidang studi masing masing, Tiap sekolah 3 orang guru Bahasa Indonesia , Matematika dan IPA.

(Ded)

121 Bencana Didominasi Tanah Longsor

WATES (KR) - Selama Januari tahun 2025 di Kabupaten Kulonprogo terjadi 121 bencana. Dari jumlah itu jenis bencana tanah longsor 88 titik, cuaca ekstrim 27 titik, banjir 2 titik, dan kebakaran 4 titik. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Triyono SIP MSI seusai Rapat Lintas Sektoral Penanganan Bencana di Ruang Kalibiru, Selasa (4/2). Dalam rapat tersebut hadir Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM, Bagian Kesra, BKAD, Baznas, Forum CSR, BPBD, dinas terkait, Bappeda, serta lainnya.

Triyono menyatakan, wilayah yang terkena dampak bencana adalah Kapanewon Girimulyo 36 kejadian, Kalibawang 10 kejadian, Kokap 25, lendah 1, Nanggulan 4, Panjatan 5, Pengasih 15, Samigaluh 10, Sentolo 8,



KR-Widiastuti

Triyono SIP MSI

Temon 3, Wates 3, serta Galur 1 kejadian.

Dampak bencana tersebut meliputi kerusakan rumah 34 unit (16 rumah perlu penanganan lebih lanjut), groundsill Srandakan, masjid 2 unit (Ngroto dan Plegan), jalan 2 ruas (Sulur dan Setan). Korban terdampak 263 jiwa, 85 KK, dan 1 luka bakar 10 persen.

”Hari ini tadi dari BPBD menyampaikan kondisi la-

pangan berkaitan penanganan bencana di Kulonprogo. Khususnya 2025, bulan Januari ternyata sudah ada 121 kejadian, baik tanah longsor paling banyak, kebakaran, pohon tumbang dan lain-lain.

Di forum ini kita bisa mengambil kesepakatan/ kesepakatan terhadap mekanisme penanganan bencana. Termasuk mekanisme untuk penanganan pasca bencana melalui belanja tidak terduga (BTT),” ucapnya.

Triyono menguraikan termasuk penanganan underpass di utara Polres, mes-tinya penanganan permanen, tetapi butuh waktu lama. ”Sehingga saya minta menjadi penanganan darurat bencana, meski tidak hanya penanganan bronjong sementara tapi sudah permanen kalau perlu dicor,” ujarnya.

(Wid)

PEMBANGUNAN FISIK BATAL
APBD Gunungkidul Dipangkas Rp 61,5 Miliar

WONOSARI (KR) - Peraturan Menteri Keuangan Nomer 29 Tahun 2025 sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 melakukan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp 61,5 miliar. Dana transfer yang dipotong program Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur sebesar 18,9 miliar dan DAK fisik sebesar Rp 42,6 miliar. Pembak Gunungkidul sekarang sedang mencermati secara detail pengurangan tersebut.

”Pastinya program yang masuk dalam DAK tersebut ditangguhkan dulu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Gunungkdiul Sri Suhartanta didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Putro Sapto Wahyono SH MT,



KR-Endar Widodo

Sri Suhartanta SIP MSI

Selasa (4/1).

Setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pemercmatan, dilanjutkan pembahasan dengan Badan anggaran DPRD Gunungkidul. Hasil rasionalisasi ini akan dibahas dengan dewan. Sementara anggota Komisi B DPRD Gunungkidul Eko Rus-

wanto mengaku komisi-nya yang membidangani anggaran segera akan membahas masalah tersebut. Jika tidak banyak item yang terkena efisiensi cukup diselesaikan antara TAPD dan Banggar. Tetapi jika banyak item pembahasannya lewat APBD Perubahan. ”Kami akan melihat dulu secara detail pemangkasan anggaran tersebut,” tambahnya.

Inpres 1 tahun 2025, melakukan efisiensi, mem-batasi belanja bersifat seremonial, memangkas perjalanan dinas 50 pesen, mem-batasi belanja honorarium, mengurangi belanja yang bersifat pendukung, fokus belanja pelayanan publik, hibah lebih selektif dan penyesuaian APBD tahun 2025.

(Ewi)

KOMITMEN CIPTAKAN KTR
Kulonprogo Berencana Tutup Display Rokok



KR-Asrul Sani

Peserta FGD Komitmen Pelaksanaan Perda KTR Rokok, salah satunya melakukan penutupan display rokok.

WATES (KR) - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Setda Kulonprogo, Drs Jazil Ambar Was'an menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo berencana melakukan penutupan display etalase rokok di beberapa toko retail

”Alhamdulillah tanggapannya positif, rencana kita mau menutup displaynya itu, tapi ternyata mereka berinisiatif sendiri menutup display rokok,” kata Jazil saat Focus Group Discus-

sion (FGD) Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tujuh Tatanan di Ruang Rapat Sermo Kompleks Pemkab Kulonprogo, Selasa (4/2).

FGD dengan topik utama mengenai penutupan etalase rokok di mini market/ retail wilayah Kulonprogo yang rencananya dimulai secara bertahap pada Maret hingga April 2025.

Lebih lanjut diungkapkan, FGD diselenggarakan untuk mengawal Perda KTR yang sebelumnya pe-

negasan tentang kawasan larangan merokok dan larangan merokok melalui operasi justisia.

Sebagai kabupaten pionir mengenai penegasan kawasan larangan merokok di Indonesia, maka Kulonprogo perlu pengawalan dan komitmen terhadap pelaksanaan Perda KTR.

”Saya kira kita sudah mengetahuinya, kita sudah melakukan operasi justisia, dilanjutkan dengan FGD agar semangat kita mengawal Perda KTR lebih *kenceng* lagi,” tutur Jazil.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo dr Sri Budi Utami menjelaskan, langkah ini sudah mulai diberlakukan untuk uji coba salah satunya di kawasan YIA untuk menciptakan bandara sehat, dimulai dari proses sosialisasi hingga pelaksanaan.

(Rul)

PRESIDEN TANGGUHKAN KEBIJAKAN
UMKM Bisa Beli Elpiji 3 Kg dari Pengecer

WATES (KR) - Warga masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lega terhadap keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menangguhkan kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram.

Wagiyem, ibu rumah tangga sekaligus pelaku umkm pemilik warung makan mengaku senang mendengar informasi Presiden menangguhkan Kebijakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut diberlakukan per 1 Februari 2025 lalu tersebut.

”Ya senanglah kebijakan tersebut dibatalkan, kemarin saya sempat *ketar-ketir* atau khawatir soal lara-ngan warga tidak boleh membeli dari pengecer,” kata Wagiyem, di Kapanewon Kokap, Selasa (4/2).

Wagiyem khawatir keluarganya kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg jika pengecer dilarang menjual. Keberadaan pengecer dinilainya justru membuatnya lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg. Dirinya tinggal mengirim pesan singkat ke pengecer untuk membeli gas baru, ketika dibutuhkan dengan cepat. ”Kalau pas gas di rumah habis, saya tinggal pesan saja ke pengecer, kemudian tinggal ambil,” ungkapnya.

Diungkapkan, kalau membeli gas di pangkalan

maka akan menambah biaya ongkos tenaga. Sebab belum tentu ada pangkalan yang dekat rumahnya dan tabung gas juga belum pasti tersedia. Karena khawatirnya maka Wagiyem sempat berpikir untuk kembali menggunakan kayu bakar sebagai antisipasi jika untuk membeli gas 3 kg sudah sangat sulit. Kini dirinya merasa lega. ”Saya berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan bagi masyarakat kecil,” harapnya.

Sebelumnya Kabid Usaha Perdagangan, Dinas Perdagangan Kulonprogo, Endang Zulywanti mengatakan, pihaknya belum menerima edaran resmi terkait kebijakan tersebut. Tapi para agen dan pangkalan

LPG di Kulonprogo sudah mengetahuinya.

Berdasarkan komunikasi dengan paguyuban agen dan pangkalan LPG, mereka memang sudah mendapatkan sosialisasi dari Pertamina Patra Niaga. Endang mengakui kebijakan tersebut memang cukup berdampak pada masyarakat sebagai konsumen.

”Selama ini masyarakat lebih banyak bergantung pada pengecer gas LPG 3 kg,” tuturnya.

Masyarakat tambahnya merasa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg di pengecer ketimbang pangkalan. Meskipun harga di pengecer lebih tinggi dibanding pangkalan yang selisihnya sekitar Rp 2.000 pertabung.

(Rul)

KEBIJAKAN PEMBELIAN GAS ELPIJI 3 KILOGRAM
Dikeluhkan Warga, Rumahnya Jauh dari Pangkalan

WONOSARI (KR) - Kebijakan baru terkait distribusi gas elpiji 3 kilogram telah resmi diberlakukan pemerintah mulai 1 Februari 2025 lalu yang sesuai aturan hanya bisa dibeli di pangkalan resmi yang terdaftar dan bukan lagi melalui pengecer dikeluhkan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, menyatakan bahwa terkait kebijakan tersebut kini pemerintah memberikan waktu transisi bagi para pengecer dalam penerapan aturan distribusi elpiji 3 kg. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap untuk memastikan penyesuaian yang lebih baik. ”Sampai saat ini, pihak pangkalan masih melakukan sosialisasi kepada para pengecer karena

mereka memiliki pelanggan tetap,” ujarnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat yang bertepatan tinggal jauh dari pangkalan, bahwa jumlah pangkalan harus disesuaikan dengan luas wilayah. Penertiban dilakukan berdasarkan alamat dan pengajuan pangkalan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan harga tetap sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah serta memperpendek jaringan distribusi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pangkalan dapat mengoordinasikan masyarakat untuk mengumpulkan fotokopi KTP sebagai syarat pengambilan gas elpiji di pangkalan. Sementara itu untuk pengecer

yang ingin mendistribusikan elpiji juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi masyarakat atau pengecer mengambil 20 tabung, maka harus jelas diperuntukkan bagi siapa saja.” Selama masa transisi, sistem ini masih diperbolehkan,” ujarnya.

Terpisah salah seorang warga Kalurahan Mijahan, Semanu , Gunungkidul, Sugiyani (45) mengaku sudah mendengar adanya larangan pengecer gas melon dari Pemerintah Pusat. Menurut dia, kebijakan ini justru menyusahkan karena akses mendapatkan kebutuhan gas menjadi sulit. Jaraknya yang jadi masalah karena pangkalan lokasinya jauh.

(Bmp)

EVALUASI DAN REFLEKSI PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA 2024
Pilkada Aman Berkat Kolaborasi dan Sinergi

TEMON (KR) - Secara umum pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kulonprogo 2024 lalu berjalan lancar, aman, damai dan kondusif. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pelanggaran dan sengketa pemilu di kabupaten ini. Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi petugas dinilai masih wajar dan tidak menjadi hambatan pelaksanaan Pemilu.

Demikian kesimpulan yang disampaikan para pembicara Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama *Stakeholder* bertajuk ‘Evaluasi dan Refleksi Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo Tahun 2024’ yang diadakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo di Novotel YIA, Temon Kulonprogo, Selasa (4/2).

Rakor diwarnai penyerahan Bawaslu Award kepada Petugas Panwas tingkat

kalurahan dan kapanewon serta Pengawas TPS terfavorit. Rakor juga menghadirkan pembicara Pengamat Politik dari IKIP PGRI, Cak Maskur.

”Tugas pengawasan terhadap rangkaian kegiatan Pilkada Kulonprogo 2024 dari awal sampai saat ini terlaksana dengan baik, tinggal nanti pelaksanaan pelantikan Cabup dan Cawabup terpilih. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada,” kata Kepala Bawaslu DIY, Mohammad Najib didampingi Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto.

Pihaknya mengapresiasi hasil kinerja Bawaslu, petugas Panwas dan Pengawas TPS. ”Kita menyadari pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tapi kolaborasi dan sinergi. Pengawasan merupakan tugas seluruh komponen yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Termasuk Pe-



KR-Asrul Sani

Disaksikan Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib, Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto menyerahkan apresiasi pada stakeholder yang ikut mensukseskan Pilkada Kulonprogo 2024.

merintah Kabupaten Kulonprogo tentu juga mempunyai andil terhadap pelaksanaan kegiatan yang tepat ini sesuai dengan amanat yang diberikan yakni kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan utamanya penganggaran,” jelas Najib.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda) I Setda Kulonprogo, Jazil Ambar Was'an mengatakan, seluruh tahapan pengawasan berjalan lancar, aman, da-

mai dan kondusif terasa dengan suasana tidak adanya persoalan terhadap pelaksanaan Pilkada Kulonprogo 2024. ”Itu salah satu hasil kinerja pengawasan yang baik. Coba kalau tidak ada pengawasan yang baik mungkin gerakan terhadap pelanggaran akan tinggi, tapi karena pengawasan di Kulonprogo berjalan bagus maka tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada di daerah kita berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

(Rul)

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Belut



KR - Istimedia

Kegiatan pemberian materi budidaya belut.

hidup masyarakat desa melalui pengembangan budidaya belut sebagai salah satu alternatif mata pencaharian warga sekitar sebagai ‘Penderes’. ”Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk kepedulian UAD dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan memperbaiki kondisi perekonomian warga desa,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan beberapa tahapan, di antaranya studi lapangan budidaya belut dan pembuatan kolam budidaya secara mandiri. Studi lapangan dilakukan dengan mengunjungi salah satu pembudidaya belut di Kabupaten Sleman untuk mempelajari teknik dan strategi budidaya yang efektif. Sementara itu, pembuatan kolam

budidaya dilakukan oleh Karang Taruna Plampang 1 di wilayah Padukuhan Plampang 1.

Ketua Karang Taruna Plampang 1, Huri, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini.

”Kami sangat terbantu dengan ilmu dan pendampingan yang diberikan oleh tim UAD. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian pemuda Plampang 1 dan secara bertahap mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

Program pengabdian ini merupakan tindak lanjut dari data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo terkait tingginya angka kemiskinan ekstrem di wilayah Kapanewon Kokap.

(Wid)